



Pemprov Kalbar Raih WTP



PREDIKAT WTP : Anggota VI BPK RI, Rizal Djallil (kiri) menyerahkan LHP BPK RI dengan predikat WTP kepada Gubernur Kalbar, Cornelis.

Dapat Bonus Finansial dari Pemerintah Pusat

PONTIANAK—Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan kan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan Pontianak. Anggota VI BPK RI, Rizal Djallil menyatakan Kalbar menjadi satu-satunya yang memperoleh predikat tersebut di Kalimantan.

"Di wilayah timur ada 17 provinsi, dan yang memperoleh hanya empat yakni Nusa Tenggara Barat,

Laporan Keuangan Kalbar

- Anggaran hampir Rp2,8 triliun, Realisasi mencapai Rp2,9 triliun
- Anggaran belanja Rp2,7 triliun dan realisasinya Rp2,5 triliun atau 93,49 persen.
- PAD realisasinya Rp1,1 triliun
- Dana transfer pemerintah pusat Rp1,2 triliun
- Pendapatan lain-lain yang sah Rp518 miliar.
- Dari 17 Provinsi di Wilayah Timur hanya empat yang dapat opini WTP: Kalbar, NTB, Sulsel dan Sulut.

◆ Ke Halaman 7 kolom 1



Pemprov Kalbar Raih WTP

Sambungan dari halaman 1

Sulawesi Selatan, Kalbar, dan Sulawesi Utara," ujar Rizal dalam konferensi pers se usai paripurna di DPRD Kalbar, Kamis (4/7).

Menurut Rizal, dengan meraih WTP, anggaran yang dialokasikan untuk rakyat kalbar benar-benar sudah sampai untuk rakyat. Kalbar juga dipastikan mendapat bonus dari pemerintah pusat dalam bentuk finansial.

Rizal menyatakan Pemprov Kalbar memiliki kehati-hatian dalam belanja. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, anggaran Provinsi Kalbar hampir Rp2,8 triliun dan dari sisi realisasinya mencapai Rp2,9 triliun. Anggaran belanja sebesar Rp2,7 triliun dan realisasinya Rp2,5 triliun atau 93,49 persen. Pendapatan asli daerah realisasinya Rp1,1 triliun, dana transfer dari pemerintah pusat Rp1,2 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp518 miliar.

Rizal menuturkan dari audit keuangan tersebut, dapat diketahui jumlah aset Pemprov Kalbar yang menjadi kendala dengan nilai mencapai Rp2,5 triliun. Aset ini terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jalan, in-

stalasi, dan aset tetap lainnya.

"Satu demi satu persoalan aset berhasil diselesaikan. Begitu juga terkait perjalanan dinas," kata Rizal.

Menurut Rizal, pemeriksaan keuangan di wilayah timur sangat berat, dimulai dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Bali. Setiap daerah memiliki sumber daya manusia berbeda. Faktor sumber daya manusia tersebut menjadi persoalan.

Saat ini, lanjut Rizal, pemerintah daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Badan Pemeriksa Keuangan juga memantau dan memberi penjelasan mengenai keuangan negara untuk memperbaiki pengelolaan keuangan di daerah. "Diharapkan kedepannya lebih baik," kata Rizal.

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengatakan predikat WTP ini tidak diperoleh secara tiba-tiba. Semuanya berkat kerjasama dan sinergisitas semua pihak, baik pemerintah, DPRD, pegawai, dan bimbingan dari BPKP, BPK, dan Inspektorat Jenderal. "Semuanya berkomitmen mengelola keuangan dengan baik dan benar. Ini adalah suatu sikap dalam mengelola pe-

merintahan dengan sungguh-sungguh dan tanggungjawab," ungkap Cornelis.

Ia menjelaskan selama ini permasalahan aset yakni tidak tercatat dengan baik. Pemprov pun menata aset yang menjadi persoalan bertahun-tahun tersebut. "Intinya adalah kerja keras semua pihak," katanya.

Cornelis juga meminta kabupaten dan kota bekerja dengan baik dalam mengelola keuangannya. Bagi yang telah memperoleh WTP, diharapkan dapat dipertahankan. "Jangan sampai turun (opiniya)," tambahnya.

Ketua Komisi ADPRD, Retno Pramudya, memberikan apresiasi tinggi terhadap raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan hasil audit terhadap laporan keuangan Pemerintah Kalimantan Barat tahun anggaran 2012.

"Kita patut acungi jempol dan berikan penghargaan tinggi kepada Gubernur Kalbar juga Kepala SKPD lain bersama kepala keuangannya," kata dia, Kamis (4/7) di ruang kerjanya.

Katanya dengan raihan predikat WTP, Pemprov Kalbar harus terus terpacu mempertahankan kinerjanya di

masa mendatang. Diharapkan laporan keuangan pada tahun-tahun berikut tetap pada posisi WTP tanpa terkecuali. "Ini berarti kinerjanya menunjukkan perkembangan luar biasa," tutur dia.

Ia menambahkan predikat WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan Badan BPK RI. Di Kalbar, baru Pemerintah Kota Pontianak yang menyandang predikat WTP dua tahun berturut-turut yaitu laporan keuangan tahun 2011 dan 2012. Sementara Pemerintah Provinsi Kalbar menyusul setelah sebelumnya predikat laporan keuangan satu tingkat di bawah WTP.

Ketua Fraksi PPP Kalbar ini memberikan apresiasi kepada Gubernur Kalbar karena mampu menjalankan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang baik, sehingga memperoleh opini mengagumkan. Ini juga harus menjadi motivasi bagi pemerintah lainnya di Kalbar. "Hal-hal yang menjadi pengecualian bagi pemerintah daerah akan menjadi perhatian dan berusaha memperbaikinya sesegera mungkin. DPRD juga akan selalu menjalankan fungsi pengawasan yang lebih menekankan pada pembinaan dan koordinasi," ucapnya. (*uni/den*)